

Judul : Senayan akan bahas usai reses
Tanggal : Sabtu, 07 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Soal Perppu Ciptaker Senayan Akan Bahas Usai Reses

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan mempelajari isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada masa persidangan mendatang. Karena Perppu tersebut diterbitkan Presiden Joko Widodo saat DPR sedang dalam masa reses pada akhir Desember 2022 lalu.

"Jadi Perppu tentang Ciptaker sudah dikeluarkan oleh Presiden baru disampaikan saat masa reses. Nah, kita baru akan aktif masa sidang pada tanggal 10 Januari dan tentunya DPR akan mempelajari isi Perppu tersebut," kata Dasco.

Dasco mengatakan, pihaknya akan mempelajari juga perihal urgensi diterbitkannya Perppu Ciptaker. Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, Perppu akan dikomunikasikan dengan seluruh fraksi di DPR.

Dasco mengaku belum bisa memberi komentar banyak terkait isi dan aturan dalam Perppu Ciptaker karena harus mempelajarinya terlebih dahulu dengan seksama, termasuk perihal aturan libur kerja. Setelah mempelajari dan membahas Perppu Ciptaker, pihaknya baru akan memberikan tanggapan kepada masyarakat maupun pemerintah.

"Untuk masalah libur saya belum bisa banyak komentar karena kan kita harus baca itu menjadi satu kesatuan, sehingga tidak ada multitafsir," ungkapnya.

Dasco menghormati ke-

wenangan pemerintah memilih mekanisme penertiban Perppu menanggapi UU Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Mekanisme tersebut juga sudah diatur oleh aturan hukum yang ada.

Namun, Dasco memastikan DPR akan tetap mencermati isi Perppu Ciptaker. "Nanti kita akan sama-sama lihat, bagaimana sifat urgensinya baru bisa nanti kita komentari," pungkasnya.

Polemik soal Perppu cukup menyita perhatian publik, serikat pekerja dan organisasi buruh merasakan dampaknya. Dasco juga mempersilakan setiap pihak, khususnya buruh, yang ingin menyampaikan pendapatnya melalui aksi unjuk rasa terkait Perppu Cipta Kerja.

Menurutnya, masukan yang diberikan oleh mereka bisa saja dipertimbangkan oleh DPR. "Menyatakan pendapat dalam bentuk unjuk rasa asal sesuai mekanisme, enggak ada masalah. Kemudian mungkin juga masukan ke DPR dalam rangka substansi yang ada juga itu kita pikir juga adalah hal yang juga bisa dilaksanakan," jelas Politisi dari Fraksi Partai Gerindra.

Ada yang beranggapan, penerbitan perppu tersebut merupakan akal-akalan untuk menyiasati putusan MK karena tidak ada kepentingan yang memaksa. Menurut Dasco, penerbitan Perppu sudah ada aturan. Selain itu, Jokowi bukanlah presiden pertama yang menerbitkan Perppu. ■ TIF